



Bab 13

Calon Presiden dengan Agenda dan Program Perubahan

Ada tiga hal yang belakangan ini sangat diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia, yaitu perubahan, perubahan, dan perubahan. Angin perubahan bertiup kencang mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan hingga ke Nusa Tenggara Barat. Di Aceh, Irwandi Yusuf, yang menjadi Calon Gubernur lewat jalur independen mampu mengalahkan calon-calon yang dijagokan oleh partai-partai besar.

Di Jawa Barat, duet Achmad Heryawan-Dede Yusuf yang diusung partai menengah, bisa menenggelamkan calon *incumbent* yang didukung Golkar dan jenderal populer yang diusung PDIP.

Di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai Golkar Country – karena merupakan daerah basis partai berlambang beringin itu, calon dari Golkar ditaklukan Syahril Yasin Limpo yang didukung partai-partai menengah. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, anak muda berusia 36 tahun, Tuan Guru Bujang, menjujukkan calon-calon yang jauh lebih populer dan didukung partai-partai besar.

Ya, tak ada kekuatan yang bisa membendung keinginan rakyat untuk berubah. Nah, pesan tentang perubahan itulah yang membuat Rizal Ramli menyingsingkan lengan baju untuk maju ke gelanggang Pemilihan Presiden 2009. Ia bertekad melakukan perubahan yang mendasar untuk memperbaiki nasib mayoritas rakyat Indonesia yang masih berkubang dalam kemiskinan.

“Kita perlu melakukan perubahan. Bukan sekedar pergantian pimpinan nasional. Pemilu yang hanya melanjutkan status quo dan sekedar

penggantian presiden, tidak akan membawa perubahan nasib bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Rizal Ramli, ketika mencanangkan Blok Perubahan, yang didukung oleh 12 partai politik, sebagai jawaban atas munculnya Blok S (Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat), Blok M (Megawati dari PDIP), dan Blok J (Jusuf Kalla dari Partai Golkar).

Bayangkan, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, dan 10 tahun era Reformasi bergulir, nasib 80% rakyat Indonesia sama sekali belum menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka masih terpenjara oleh kemiskinan: tinggal di rumah yang sempit sehingga mesti berdesak-desakan, susah mencari makan, pendidikan makin tidak terjangkau, dan jika sakit takut setengah mati. Bukan takut menghadapi jarum suntik atau meja operasi, tapi takut tidak bisa membayar.

Rizal Ramli sangat memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat kelas bawah itu. Sejak menjadi mahasiswa ITB pada tahun 1970-an, Rizal kerap mengunjungi daerah-daerah kantong kemiskinan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Bahkan, sebagai anak yatim piatu sejak usia 7 tahun, Rizal Ramli juga sempat merasakan pahit getirnya kemiskinan itu.

Ia ingat betul, bagaimana galau pikirannya ketika selepas SMA dan mendaftar di ITB. Rizal Ramli diterima di ITB, tapi tidak memiliki uang untuk membayar uang kuliah. Akhirnya, ia meminta dispensasi untuk tidak masuk kuliah dulu dan kemudian memilih bekerja di sebuah percetakan di Jakarta. Enam bulan kemudian, setelah uang terkumpul, baru Rizal Ramli mengikuti perkuliahan.



Rizal Ramli berorasi di depan massa di bunderan Hotel Indonesia, Jakarta. **Rizal Ramli** mengkritik kebijaksanaan kenaikan harga BBM.

Dan kini, beban masyarakat semakin berat untuk melanjutkan pendidikan, karena perguruan tinggi negeri mematok uang masuk puluhan juta rupiah. Anak orang miskin, betapapun cerdasnya, tidak mungkin mencicipi bangku kuliah. Walhasil, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan semakin jauh dari jangkauan mayoritas rakyat Indonesia.

Kondisi yang amat memberatkan mayoritas rakyat itulah yang harus didobrak dengan agenda perubahan yang nyata. Dan perubahan, tidak bisa diserahkan kepada kekuatan-kekuatan status quo, yang hanya akan melanjutkan rute perjalanan bangsa Indonesia melalui Jalan Lama.

Karena itu, harus ada pemimpin baru yang bisa memandu Indonesia menempuh Jalan Baru. Jalan yang memungkinkan mayoritas rakyat bisa menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Bebas dari kemiskinan. Bisa mencukupi sandang pangan dan papan yang layak. Juga memiliki akses yang memadai untuk menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan. Rizal Ramli bukan Calon Presiden “dadakan”. Sejak dua tahun terakhir, Rizal Ramli kerap mempresentasikan gagasan orsinalnya mengenai agenda perubahan dan Jalan Baru di berbagai tempat dalam berbagai kesempatan.

Dan selama dua tahun terakhir pula Rizal Ramli semakin intensif melakukan kunjungan ke berbagai daerah, bertemu dengan para kyai di Pesantren, mulai dari Parung, Tasikmalaya, Cirebon, Jombang, Jember, Pasuruan, hingga ke Mataram. Ia juga mengunjungi Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, hingga ke Papua, untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan. Kawasan Sumatera terus dijelajahi, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Bangka Belitung, hingga Lampung untuk bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik, kaum intelektual, dan menyambangi masyarakat hingga ke pasar-pasar tradisional.

Selain memaparkan gagasan Jalan Baru dan agenda perubahan, Rizal Ramli juga kerap memotret kondisi riil masyarakat untuk menampung keluhan kesah mereka mengenai kehidupan yang makin berat. Memang, temuan yang paling menonjol dari penjelajahan ke berbagai daerah itu adalah merosotnya taraf hidup mayoritas masyarakat, termasuk anjloknya omzet usaha menengah dan kecil hingga 40%. Rizal Ramli juga menyaksikan kebangkrutan industri kerajinan rotan sepanjang pantai utara Jawa – karena

pemerintah SBY mengizinkan ekspor rotan mentah. Ratusan ribu tenaga kerja di industri rotan kehilangan pekerjaan. Sementara, China pun muncul sebagai produsen barang rotan terkemuka, yang bahan bakunya diimpor dari Indonesia.

Dalam perjalanan ke berbagai daerah itu, hanya satu agenda yang selalu dibawakannya: Indonesia harus berubah. Indonesia harus meretas Jalan Baru, dan meninggalkan Jalan Lama yang sudah ditempuh oleh rezim Orde Baru hingga pemerintah SBY. Yang dimaksud Jalan Lama adalah kebijakan pembangunan ekonomi yang disetir oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF-Bank Dunia, atau lebih dikenal sebagai Konsensus Washington. Kebijakan itu dijalankan oleh para ekonom Mafia Berkeley pada era Soeharto, yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro, dan diteruskan oleh murid dan cucu muridnya seperti Boediono dan Sri Mulyani pada era pemerintahan SBY saat ini. Mereka dikenal sebagai “*darling*” IMF-Bank Dunia.

Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley dan anak-cucu muridnya sama dan sebangun sejak dulu, yakni membebek pada pola kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF-Bank Dunia, seperti privatisasi BUMN, liberalisasi sistem keuangan dan perdagangan. Pendek kata, kebijakan propasar yang ugal-ugalan, yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin berbiak lebih cepat ketimbang yang mampu diangkat dari kemiskinan lewat program penanggulangan kemiskinan. “Itulah yang kami namakan sebagai Jalan Lama,” kata Rizal Ramli.

Dan Jalan Lama gagal membawa Indonesia menjadi negara besar yang

disegani di Asia. Dilihat dari segi pendapatan, yakni pruduk domestik bruto (PDB) per kapita, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan bahkan China. Padahal, pada tahun 1960-an, PDB per kapita semua negara hampir sama, sekitar US\$ 100/kapita. Pada tahun 2005, PDB per kapita Indonesia hanya sekitar US\$ 1.260. Malaysia 4 kali kita, Korea Selatan 13 kali kita, Thailand 2 kali kita, Taiwan 12 kali kita, dan bahkan China telah menjadi 1,4 kali kita. Selama 40 tahun terakhir, Indonesia paling tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Rizal Ramli bersama Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Barsyah Zarmuki dalam rangka keikutsertaan sebagai Calon Presiden pada konvensi PBR.



Tidak ada perubahan pola kebijakan yang dilakukan pemerintah SBY dibandingkan dengan pemerintah Soeharto. Keduanya sama-sama gagal meningkatkan kesejahteraan mayoritas rakyat. Memang, pada tahun 2004 ada yang menjanjikan perubahan. Kenyataannya, hal itu sekedar retorika. Faktanya, jalan yang ditempuh masih Jalan Lama yang telah terbukti gagal membawa kesejahteraan dan kebangkitan Indonesia selama tiga dekade lebih Orba berkuasa. Jalan Lama itu memperkokoh neokolonialisme, menggadaikan kekuatan politik dan ekonomi Indonesia, sehingga potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia yang sangat besar terabaikan.

Perubahan tidak bisa diserahkan kepada kekuatan status quo. Karena itulah, Rizal Ramli merasa terpancang untuk tampil di gelanggang Pemilihan Presiden agar bisa menjalankan agenda perubahan secara fundamental. Maka, Rizal Ramli pun sibuk melobi partai-partai properubahan untuk menjadi pendukungnya. Kini, sudah 15 partai yang berada di belakang Rizal Ramli, yakni Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Bintang Reformasi, PNBK, Partai Damai Sejahtera, PKNU, PPRN, dll.

Jalan yang ditempuh oleh Rizal Ramli menuju Pilpres 2009 bukan bentangan karpet merah. Malah sebaliknya, merupakan jalan berbatu dengan jurang menganga di kanan-kirinya. Pihak kepolisian misalnya, pada tanggal 5 Januari 2009, dengan pertimbangan yang sangat politis, menetapkan Rizal Ramli sebagai tersangka penghasut dari aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.

Bukan cumaitu, sebelumnya Rizal Ramli juga dicopot dari jabatannya sebagai

Presiden Komisaris PT Semen Gresik karena kerap mengkritik kebijakan pemerintah SBY. Alasan pencopotan, sebagaimana dikemukakan Meneg BUMN Sofyan Djalil, karena langkah-langkah Rizal Ramli tidak sesuai dengan etika sebagai Komisaris Utama. Alasan Sofyan Djalil itu sangat naif dan bisa diperdebatkan. Jika karena kritikan tajam yang dilontarkan Rizal Ramli kepada pemerintah SBY dinilai sebagai “pelanggaran etika”, maka di negeri ini tidak lagi tersedia ruang yang lapang untuk berbeda pandangan dan beradu argumentasi.

Rizal Ramli memberi sambutan di depan massa PNBK di GOR Pajajaran, Bandung.



Penggunaan kekuatan secara telanjang, baik dalam pencopotan sebagai Preskom PT Semen Gresik maupun penetapan sebagai tersangka, menunjukkan pemerintah sekarang telah menjelma menjadi baby Orba. Tokoh-tokoh kritis dibungkam atau disingkirkan, kalau perlu dengan menjadikan polisi sebagai alat untuk “menggebuk”.

Meski terus dijegal dan didzalimi oleh penguasa, toh Rizal Ramli pantang menyerah. Ia tetap konsisten memperjuangkan agenda perubahan yang diyakininya. Untuk itu, pada awal tahun 2009, Rizal Ramli mendirikan “Rumah Perubahan” yang berokasi di Jalan Panglima Polim V, Jakarta Selatan, sebagai markas besarnya untuk menyebarkan “virus” perubahan. Beberapa tokoh politik sempat singgah ke Rumah Perubahan, antara lain, Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Sutiyoso, Calon Presiden dari Partai Indonesia Serikat (PIS). Baik Taufiq Kiemas maupun Sutiyoso, mendukung sepenuhnya agenda perubahan yang diusung Rizal Ramli bersama Blok Perubahan. Upaya Rizal Ramli mensosialisasikan agenda perubahan tidak sia-sia. Jika sebelumnya nama Rizal Ramli tidak pernah masuk “hitungan” dalam berbagai survei, ternyata dalam polling terbaru yang diselenggarakan Lembaga Survei Nasional yang dilaksanakan 5 – 15 Maret 2009, tiba-tiba saja nama Rizal Ramli muncul diperingkat 6, dengan elektabilitas 3,2%. Munculnya nama Rizal Ramli yang langsung menyodok ke peringkat 6 ini, melewati nama-nama Calon Presiden lainnya, yakni Wiranto (1,5%), Hidayat Nurwahid (1,2%), Sutiyoso (1%), dan Soetrisno Bachir (0,5%). Adapun peringkat 1 sampai 5 secara berurutan ditempati SBY (45,1%), Megawati (15,3%), Prabowo Subianto (10,2%), Sri Sultan Hamengkubuwono X (5,8%), dan Jusuf Kalla (3,3%).



Rizal Ramli bersama Taufik Kiemas dan Adhie Marsadi. Kedua tokoh kerap bertemu untuk membicarakan masalah bangsa.

Tujuan Perubahan

Menurut Rizal Ramli, perubahan harus membawa manfaat yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan politik dan ekonomi, serta membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan dihormati di dunia. Perubahan itu akan menjadi awal dari Kebangkitan Rakyat dan Kejayaan Indonesia.

Perubahan baru bermanfaat jika terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga rakyat mampu mendapatkan 5P (Pangan, Pekerjaan, Pendidikan,



Mantan Gubernur DKI Jaya dan Calon Presiden dari PIS, Sutiyoso, berkunjung ke **Rizal Ramli** di Rumah Perubahan.

Pelayanan Kesehatan, dan Perumahan). Peningkatan penyediaan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perumahan juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pendidikan harus diubah dari sistem pendidikan yang hanya konsumtif (indoktrinasi dan penjejalan informasi) menjadi pendidikan yang lebih produktif dan kreatif sehingga mampu menghasilkan analisis, sintesis, peningkatan nilai tambah, dan kreativitas. Seluruh rakyat Indonesia juga

harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan terjangkau. Kesempatan pendidikan tidak boleh dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat mampu, tetapi harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Perubahan sistem pendidikan dan peningkatan akses tersebut dapat dibiayai dengan hasil renegosiasi kontrak sumber daya alam. Sehingga terjadi transformasi dari Sumber Daya Alam menjadi Sumber Daya Manusia unggul. Sumber daya manusia unggul itulah yang akan menjadi motor perubahan dan kebangkitan Indonesia pada awal Abad ke 21.

Tujuan perubahan tersebut akan lebih cepat tercapai jika kita memperjuangkan kedaulatan politik, ekonomi, keuangan, pangan, energi, pertahanan, dan teknologi. Kedaulatan itulah yang terabaikan, bahkan sengaja dilupakan selama 40 tahun terakhir, sehingga 80% rakyat Indonesia belum menikmati arti kemerdekaan dan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Asia. Perubahan dari negara “terjajah” menjadi negara yang berdaulat akan merupakan kekuatan dahsyat untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

Berikut ini gagasan dan agenda Perubahan yang dicanangkan Rizal Ramli:

Kedaulatan Politik:

Walaupun secara normatif dan formal Indonesia mengaku sebagai negara yang berdaulat, tetapi didalam prakteknya pengaruh negara-negara besar dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan masih sangat dominan. Negara-negara berkembang seperti Malaysia, China, India, Brazil, dan Iran memiliki kedaulatan yang lebih kuat dalam bidang politik, ekonomi

dan pertahanan. Tahun ini harus menjadi awal dari kebangkitan kedaulatan politik bangsa Indonesia.

Kedaulatan Ekonomi:

Dengan sengaja dan sistematis selama 40 tahun terakhir, kedaulatan ekonomi telah digadaikan kepada negara adidaya dan lembaga keuangan multilateral. Melalui ketergantungan hutang, kekuatan-kekuatan luar tersebut kemudian mendikte, memesan, dan mengijon undang-undang dan peraturan Pemerintah, bahkan ikut menentukan dalam penunjukan pejabat-pejabat ekonomi sehingga sesuai dengan kepentingan strategis jerat Washington (Washington Concensus).

Tidak aneh bahwa strategi dan kebijakan ekonomi sering lebih menguntungkan kepentingan diluar Indonesia ketimbang memberi manfaat untuk rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi bahkan sering menyebabkan *proses pemiskinan struktural*: rakyat Indonesia bagaikan ayam yang mati di lumbung padi, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah dan alam yang indah.

Agar supaya rakyat lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi negara maju, maka kedaulatan ekonomi harus direbut sehingga proses pemiskinan struktural dihentikan dan kebijakan ekonomi memberi manfaat untuk rakyat dan kepentingan nasional.

Kedaulatan Pangan, Energi, Pertahanan dan Teknologi

Sebagai negara dengan penduduk 220 juta jiwa, adalah sangat penting untuk memiliki kedaulatan di bidang pangan, energi, pertahanan, dan

teknologi. Kedaulatan di keempat bidang tersebut merupakan prasyarat penting untuk menjadi negara besar dan dihormati di dunia.

Perubahan, Demokrasi dan Hak Asasi

Banyak kalangan yang menilai bahwa 10 tahun demokrasi dan reformasi tidak membawa manfaat bagi rakyat dan kejayaan Indonesia adalah akibat sistem yang terlalu demokratis. Mereka ingin mengembalikan jarum jam, ingin membawa Indonesia kembali kedalam sistem otoriter. Padahal Indonesia telah mengalami pemerintahan super-kuat selama 32 tahun. Hasilnya Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara besar di Asia, kesejahteraan mayoritas rakyatnya menyedihkan, *gap* antara yang kaya dan miskin luar biasa, dan tindakan anti demokratis serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia sangat menonjol. Upaya mengembalikan sistem otoriter justru akan membuat Indonesia semakin mundur kebelakang, sistem yang sangat tidak populer dalam dunia yang semakin demokratis.

Perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan kejayaan Indonesia dapat dan harus dilakukan dalam bingkai demokratis, yang diperlukan bukan pemerintahan yang kuat ala Orba, tetapi pemerintahan efektif dalam konteks negara demokratis.

Reformasi Kelembagaan:

Reformasi Birokrasi:

Sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi agar supaya birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat dan perang terhadap korupsi betul-betul bisa efektif. Perlu reformasi dalam sistem rekrutmen, sistem training, evaluasi, reward dan penalty birokrasi.

Reformasi Partai Politik:

Demokrasi dan reformasi selama 10 tahun gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat karena telah dibajak oleh pikiran lama (neo-liberal) yang semakin memperkokoh neo-kolonialisme dan oligarki politik-ekonomi. Perlu segera dilakukan reformasi terhadap Partai Politik agar betul-betul menjadi saluran aspirasi kepentingan rakyat. Untuk itu perlu segera dilakukan reformasi pembiayaan partai-partai politik sehingga demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang.

Seperti halnya di Jerman dan beberapa negara Eropa, partai-partai politik sebaiknya dibiayai oleh negara sampai pendapatan per kapita rakyat Indonesia mencapai US\$ 5 ribu per tahun. Dengan demikian, partai bisa merekrut kader-kader muda yang idealis dan cakap, pengeluarannya harus diaudit sehingga lebih transparan.

Reformasi TNI dan POLRI:

Selama beberapa tahun terakhir reformasi TNI dan POLRI nyaris terhenti. Pemerintah Perubahan akan memperkuat TNI dari segi kualitas, peralatan militer, dan sistem pendukung agar TNI betul-betul bisa diandalkan untuk membela negara Republik Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut akan ditingkatkan untuk mendukung konsep negara maritim, mempertahankan wilayah Kepulauan Indonesia, dan menghentikan pencurian kekayaan laut Indonesia. Realokasi Armada Barat di Jakarta dan Armada Timur di Surabaya perlu dilakukan sehingga betul-betul mencerminkan konfigurasi strategis untuk melindungi kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia.

Reformasi POLRI juga perlu dilanjutkan agar Kepolisian menjadi pelindung

dan pengayom masyarakat, dan bukan alat dari kekuasaan untuk membungkam pikiran masyarakat dan memasung demokrasi.

Agenda Perubahan :

1. Pangan yang surplus dan terjangkau:

Dalam waktu kurang dari 3 tahun, produksi pangan Indonesia harus surplus dan harganya terjangkau untuk rakyat. Indonesia yang selama ini menjadi importir produk pangan (beras, gula, kedelai, jagung, garam, dll) harus berubah menjadi eksportir produk pangan. Indonesia bahkan bisa jadi lumbung pangan Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan:

1. Pembangunan waduk dan irigasi di sepanjang aliran Sungai Citarum, Bengawan Solo, Sungai Brantas, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan delta Membramo Papua.
2. Ekstensifikasi bibit unggul dengan produktivitas yang lebih tinggi.
3. Peningkatan penggunaan pupuk organik dan nonorganik yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.
4. Pendirian Bank Pertanian yang akan meningkatkan akses kredit untuk petani.
5. Kebijakan harga yang akan menguntungkan petani melalui kebijakan tarif maupun nontarif.
6. Pemberian tanah negara di luar Pulau Jawa kepada petani, diikuti dengan mekanisasi pertanian.

2. Pertumbuhan Ekonomi di Atas 10%

Selama 40 tahun Orba & baby Orba, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata hanya mencapai 6%. Tingkat pertumbuhan ekonomi seperti itu

adalah rata-rata (*mediocre*) dibandingkan dengan negara-negara di Asia Timur. Kinerja ekonomi Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Philipina. Itulah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan rakyat di Malaysia, Korea, Taiwan, dan China jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia selama 40 tahun terakhir. Jika kita hanya berbangga dengan pertumbuhan 6% maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Tanpa perubahan jalan dan strategi, pada tahun 2045, setelah seratus tahun kemerdekaan, Indonesia akan semakin tertinggal, bahkan oleh negara seperti Vietnam. Mayoritas rakyat Indonesia masih akan tetap miskin.

Jepang di bawah Perdana Menteri Ikeda, dengan program Double Income Plan, pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 12% selama dua dekade. Itulah yang menyebabkan Jepang mampu mengejar ketinggalannya dari negara Barat. Demikian juga halnya, China selama 15 tahun mencapai pertumbuhan ekonomi 10 – 12% setiap tahun. Itulah yang mengakibatkan China menjadi raksasa ekonomi di Asia.

Dengan Jalan Baru dan berbagai terobosan kebijakan, Indonesia akan mampu keluar dari krisis Jilid II ini dalam waktu kurang dari 2 tahun dan mempersiapkan dasar-dasar untuk menjadi negara yang kuat dan besar di Asia. Dengan tumbuh di atas 10% per tahun, maka akan tersedia lapangan kerja untuk pemuda pemudi Indonesia, peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi gelas anggur merupakan hasil kebijakan ekonomi Orba dan baby Orba selama 40 tahun terakhir. Di bagian atas gelas anggur dikuasai

oleh kelompok bisnis besar dan BUMN yang tidak efisien dan kebanyakan “jago kandang” sehingga sering menjadi beban (*liability*) negara. Pegangan gelas anggur tersebut sangat tipis, yang menunjukkan kecilnya golongan menengah dan usaha skala menengah yang independen. Bagian bawah dari gelas anggur tersebut sangat besar yang menunjukkan puluhan juta usaha kecil dan ekonomi rakyat. Negara selama ini selalu memanjakan bagian atas dari gelas anggur dan mengabaikan lapisan bawah, yang struktur ekonominya super-kompetitif dan margin keuntungannya sangat tipis.

Struktur gelas anggur yang sangat timpang tersebut sangat tidak adil, akan membuat demokrasi tidak langgeng karena potensi konflik sosial yang sangat besar dan dominasi politik dan kebijakan oleh kelompok ekonomi yang lebih kuat. Struktur yang sangat tidak adil tersebut harus diubah menjadi struktur piramida. Indonesia memerlukan usaha skala besar tetapi bukan sekedar “jago kandang” tetapi juga “jado dunia”, yang kompetitif didunia internasional dan mampu membawa nilai tambah di pasar internasional ke dalam negeri. Transformasi dari “jago kandang” menjadi “jado dunia” harus dilakukan secara bertahap melalui kebijakan yang koheren. Dengan demikian mereka diubah dari “beban” menjadi “manfaat” bagi negara dan bangsa Indonesia.

Berbagai kebijakan juga harus dilaksanakan untuk mengembangkan golongan dan usaha skala menengah yang independen. Di samping itu, berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan, harus dirancang untuk membantu usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah. Seperti diketahui, selama ini, pengusaha kecil langsung dikejar untuk membayar

pajak jika keuntungannya di atas Rp18 juta. Batas minimum kena pajak tersebut harus dinaikkan menjadi Rp 60 juta sehingga penumpukan modal usaha kecil akan lebih cepat.

4. Pembangunan Jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua.

Pembangunan daerah-daerah di luar pulau Jawa relatif tertinggal dan manfaat eksploitasi sumber daya alam untuk rakyat sangat terbatas. Salah satu penyebab utamanya adalah fasilitas infrastruktur yang sangat tidak memadai. Pemerintahan Perubahan yang akan datang akan membangun jaringan Kereta Api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, yang akan melewati daerah pusat-pusat pertanian, perkebunan, pertambangan dan kota-kota utama. Pembangunan jaringan kereta api tersebut akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, langsung maupun tidak langsung, dan biaya transportasi untuk rakyat dan produk-produk lokal akan lebih murah.

Pemerintah Perubahan akan memacu pembangunan fasilitas transportasi massal di kota-kota besar yang memiliki penduduk di atas 3 juta orang. Dengan transportasi massal tersebut, terutama kereta api kota dan subway, maka biaya transportasi penduduk perkotaan akan lebih murah, mengurangi kemacetan kota dan berbagai dampak negatif ekonomi dan lingkungan. Pemerintah Perubahan juga akan membangun jaringan pelabuhan laut dan udara sehingga ekonomi wilayah dan daerah di seluruh Indonesia akan meningkat. Pemerintah Perubahan juga akan menyelesaikan rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa 1.400 km, yang selama pemerintahan SBY baru selesai terbangun kurang dari sepuluh persen. Pemerintahan

Perubahan juga akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mega-watt, yang pelaksanaannya kurang dari 15 persen selama pemerintah SBY.

Pemerintah Perubahan juga akan mempercepat diversifikasi sumber-sumber energi alternatif, termasuk geotermal dan bioenergy. Pemerintahan Perubahan juga akan mengubah program bagi-bagi uang seperti BLT menjadi program pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, air bersih, irigasi tertier dan fasilitas MCK sehingga manfaatnya bisa meningkat berkali-kali lipat.

5. Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Mentah

Selama ini Indonesia hanya menjual bahan baku dan bahan mentah. Seperti karet, cokelat, rotan, kopra, gas, batu bara, minyak bumi dan bahan-bahan tambang. Negara yang hanya penghasil dan eksportir bahan mentah tidak akan pernah menjadi negara yang makmur dan sejahtera karena nilai jual bahan mentah sangat rendah dibandingkan dengan produk akhir. Untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja lebih banyak, maka Pemerintahan Perubahan akan memacu pengembangan industri pengolahan bahan baku dan bahan mentah, serta produk-produk turunannya. Pengembangan industri pengolahan secara besar-besaran akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru untuk pemuda-pemudi Indonesia, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

6. Peningkatan Manfaat Program Desentralisasi untuk Rakyat

Desentralisasi telah berhasil mengurangi sentralisasi kekuasaan Pemerintah Pusat dan mendorong penguatan Pemerintah Daerah Tingkat II. Tetapi

sayangnya, rata-rata anggaran 420 Pemda Kabupaten dan Kotamadya yang betul-betul untuk kepentingan rakyat baru mencapai 30%, bagian terbesar justru untuk keperluan eksekutif dan legislatif. Perlu perubahan segera agar supaya 70% anggaran Pemda betul-betul untuk kepentingan rakyat setempat. Perubahan tujuan anggaran tersebut dapat dicapai melalui peningkatan demokratisasi dan transparansi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Peranan dan fungsi Gubernur perlu ditingkatkan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi program maupun anggaran.

7. Strategi Pembangunan Tanpa Utang

Selama ini sepertiga dari sekitar Rp 1.000 triliun anggaran negara digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang. Sebagian besar dari beban utang tersebut telah dikorup oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu dan diketahui oleh Bank Dunia dan negara kreditor. Utang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai utang najis (*odious debt*) yang harus direnegosisasikan sehingga beban rakyat lebih kecil. Karena mental inlander, Indonesia telah 3 kali kehilangan momentum negosiasi hutang: ketika transisi otoriter ke demokratis, perang melawan terorisme, dan bencana Tsunami.

Ketergantungan terhadap hutang juga bisa dikurangi secara drastis dengan melakukan perang terhadap korupsi dan penegakan hukum tanpa tebang-pilih, peningkatan efisiensi anggaran dan penghentian (*moratorium*) pembelian mobil dan rumah pejabat, serta pembangunan kantor-kantor pemerintah. Penghematan dan efisiensi hanya bisa efektif jika dilakukan reformasi birokrasi yang agresif.

Ketergantungan terhadap utang juga bisa dikurangi dengan mengubah pola pengeluaran pemerintah terutama untuk pembelian barang-barang modal (*capital spending*), yang mencapai sekitar Rp 400 triliun setahun. Pemerintah tidak perlu lagi membiayai pembelian peralatan dan barang modal, cukup dengan melakukan sewa-guna (*leasing*) sehingga pengeluaran untuk sewa-guna cukup senilai Rp 70 triliun. Penghematan sekitar Rp. 330 triliun per tahun bisa digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi dan Trans-Papua, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.

8. Koreksi Peranan Bank Sentral

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997/98, IMF dan Bank Dunia memanfaatkan situasi tersebut untuk mengurangi peranan Bank Sentral dengan mengubah Undang-undang Bank Indonesia (BI). Tugas utama Bank Indonesia hanya mengendalikan inflasi dan nilai tukar, tetapi peranan Bank Indonesia dalam penciptaan lapangan pekerjaan (*employment creation*) dihapuskan. Padahal di negara yang sudah sangat maju seperti Amerika dan banyak negara Eropa, selain stabilisasi nilai tukar dan pengendalian inflasi, Bank Sentral juga bertugas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 1970-an, kredit likuiditas Bank Indonesia ikut memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor perkebunan sehingga Indonesia saat ini menjadi eksportir utama dunia untuk komoditas sawit, coklat, dan karet.

Pengebirian Bank Indonesia harus dihentikan, Undang-undang Bank Indonesia harus direvisi sehingga fungsinya juga mencakup penciptaan

lapangan kerja. Dengan perubahan tersebut, Bank Indonesia tidak hanya berdagang kertas dan surat utang, tetapi juga memainkan peranan aktif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.